

DAFTAR RUJUKAN

Jurnal :

- Adrian, A. Z., et. al. (2022). Teori Peemisahan Kekuasaan Trias Politica dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. (*Jurnal Filsafat Terapan*). 1(2).
- Aini, Intan A. N., et al. (2025). Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Pelanggaran, Sanksi, dan Solusi Penguatan Integritas Melalui Studi Kasus Hakim DS di PN Jakarta Barat, *Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern*. 9(4).
- Akbar, M. A. T., & Kayus Kayowuan L. (t.t.). Implementasi Kode Etik Profesi Hakim dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan, *Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(3).
- Amalia, Cindy, et. al. (2025). Tumpang Tindih Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Tantangan dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 1(4).
- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Lex et Societatis*. 5(3).
- Bintarto, M. A. I., et.al. (2019). Penerapan Fungsi dan Peran Al-Hisbah dalam Pengawasan di Baitul Maal Wa Tamwil, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 6(3).
- Budiman, Rasji E. K., & V. O. Siswanto. (2024). Pertanggungjawaban Hakim Yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus: Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman), (*JLEB: Journal of Law Educarion and Business*). 2(2).
- Budiman, S. D. G. (2018). Akuntabilitas Lembaga Peradilan Yang Mandiri Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (*Lex Administratum*). 6(4).
- Fadholi, Faruq ‘Azzam, dkk. (2022). Kedudukan Dewan Pengawas KPK Terhadap Eksistensi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (*Simbur Cahaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*). 29(2).

- Farbadi, M. P., et. al. (2025). Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia, (*Media Hukum Indonesia (MHI)*). 2(6).
- Fitriani, Heliza., & Ahmad Chusairi. (2024). Pengaruh Social Pressure (Tekanan Sosial) terhadap Kesehatan Mental Remaja, *Artikel Penelitian: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga*.
- Hofifah. (2023). Pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Agung dalam Lingkungan Peradilan Perspektif Fath Dzariah, (*Al-Qanun*). 26(1).
- Imani, Yashinta Nurul, & Kayus Kayowuan L. (2025). Krisis Integritas dalam Etika Profesi Hukum: Studi Kasus Suap Hakim PN Surabaya, (*CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*). 14(1).
- Junianto, A. & M. N. Majid. (2022). Ombudsman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Ombudsman In Fiqh Siyasah Perspective, *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*. 1(2).
- Larasati, Andriani. (2020). Kontestasi Kewenangan Komisi Yudisial sebagai Element Of External Auditor dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung, (*Jurnal Hukum Lex Generalis*). 1(3).
- Liba, Y., & Supriyadi A. A. (2025). Praktik di Pengadilan Berbasis Elektronik: Bentuk Konkret Mewujudkan Transparansi, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. 6(1).
- Marpaung, Hillery Olivia, & Reny Agistini. Analisis Yuridis Dugaan Suap Hakim Perkara Ekspor Minyak Sawit Ditinjau dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Legislasi Kontemporer*. 9 (2).
- Nurhayati, Y., et. al. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Prespektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. 2(1).
- Oktafianto, Wahyu Dwi, dkk. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim, (*Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*). 2(2).
- Putra, F. W., et. al. (2025). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Hakim Pengawasan dan Pengamatan Berdasarkan Pasal 277 jo Pasal 280

- KUHAP, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*. 11(1).
- Putra, M. A. A. (2021). Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana, *Justisi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*. 7(2).
- Putri, N. K. A. V., et. al. (2025). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Kapabilitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa, *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*. 6(3).
- Rachman, Fathur. (2018). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (*Jurnal Keadilan Progresif: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*). 9(2).
- Rudiyansah, M. M. D. H. (2024). Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial, *Abdurrauf Law and Sharia*. 1(2).
- Sabadina, Uni. (2025). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif), (*Desiderata: Law Review*). 2(1).
- Sari, Ratna. (2022). Pengaruh Beban Kerja dan Tipe Kepribadian Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan, *Jurnal Ilmiah: Bisnis & Kewirausahaan*. 11(1).
- Sayuti. (2024). Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al Mawardi, *Siyasah Wa Qanuniyah*. 2(1).
- Selfia, J. J., Gilalo & D, Suprijatna. (2024). Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia, *Karimah Tauhid*. 3(4).
- Sekarsari, Dila May., et al. (2022). Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. (*Jurnal Preferensi Hukum*). 3(3).
- Steven, & C. Meiden. (2020). Fraud Triangle Terhadap Financial Statement Fraud, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*. 17(2).
- Sujeewa, G. M. M., et al. (2018). The New Fraud Triangle Theory-Integrating Ethical Vaues of Employees, *International Journal of Business, Economics and Law*. 16(5).

- Suprpto, Ade R. (2025). Tanggung Jawab Pidana Dan Etik Hakim Dalam Kasus Suap Berdasarkan Perspektif Hukum Positif. (*Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*). 1(2).
- Suryanto, Ahmad F. B. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 1(2).
- Syam, M. A., & K. K. Lowoleba. (2023). Etika Dan Profesi Hakim Terhadap Regulasi Penegakan Hukum Di Negara Republik Indonesia, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. 1(5).
- Takaendengan, Domina. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*. 6(3).
- W., Lulu Zaharani K. (2024). Upaya Kejaksaan Agung dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana Korupsi Guna Mewujudkan Pemerintahan Serta Masyarakat yang Bersih dan Transparan. 4(1).
- Wahyuni, & G. S. Budiwitjaksono. (2017). Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan, *Jurnal Akuntansi*. 21(1).
- Yulia, R., & D. Arie Widagdo. (2024). Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi, *Proceeding APHTN-HAN*. 2(1).

Buku :

- Asshiddiqie, J. (2015). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Cetakan ke-II (edisi revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ferina, Ika Sasti. (2023). *Konsep Financial Statement Fraud*, Cetakan ke-I. Palembang: CV. Amanah.
- Hambali, M. Ridlwan, dkk. (2021). *Etika Profesi*, Cetakan ke-I. Bojonegoro: CV. Agrapana Media.
- Ibrahim, Johny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Saleh, Imam A. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*. Malang: Setara Press.
- Sihobing, Eka Nam. (2018). *Hukum Kelembagaan Negara*. Medan: Pustaka Prima.
- Suadi, Amran. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Cetakan ke-I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sungono, Bambang. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparto., (2017). *Dinamika Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Karya (BIKA).
- Suparto. (2021). *Komisi Yudisial Lembaga Negara Konstitusi, Amputasi Kewenangan dan Prospeknya*. Jakarta: Bina Karya (BIKA).

Skripsi :

- Abdul Muhaimin. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.
- Brian Aji Nugroho. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Al Hisbah serta Relevansinya terhadap Lembaga Pengawas Pasar Tradisional, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023.
- Farhani Fajria Safitri. Pengaruh Pressure, Opportunity, dan Rationalization Terhadap Niat Melakukan Fraud Dengan Law Enforcement Sebagai Variabel Moderating: Survei Pada Profesi Akuntan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Isharyanto. Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia). Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Usman Hasibuan. Legitimasi Hukum Kewenangan Kepolisian Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. 2024.

Widi Astuti. Diskursus Anomali Hukum Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Integritas Sistem Peradilan Perspektif Dar'Al-Mafasid. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Undang-Undang :

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website :

IS KPK, Tugas Dewan Pengawas KPK. dewas.kpk.go.id, 2026.
https://dewas.kpk.go.id/tugas-dewan-pengawas_kpk/#. Diakses 19 April 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Dari Kampus ke Pengadilan, KPK Dorong Mahasiswa dan Hakim Jadi Benteng Terakhir Antikorupsi.” [Kpk.go.id](http://kpk.go.id). 16 April 2026.
<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/dari-kampus-ke-pengadilan-kpk-dorong-mahasiswa-dan-hakim-jadi-benteng-terakhir-antikorupsi>. Diakses 19 April 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Penindakan”, kpk.go.id. 31 Desember 2025.
<https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>. Diakses 19 April 2026.

- KumparanNEWS, “Data ICW: Ada 29 Hakim Terjerat Kasus Suap Kurun 2011-2024, Nilainya 107, 9 M.” Kumparan.com, 21 April 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/data-icw-ada-29-hakim-terjerat-kasus-suap-kurun-2011-2024-nilainya-rp-107-9-m-24v3xi1IJJN/2>. Diakses 19 April 2026.
- Muhammad Ali, “*Pro Kontra Kenaikan Gaji Hakim: Solusi Berantas Korupsi?*”, Liputan6.com, 13 Juni 2025, <https://www.liputan6.com/news/read/6051908/pro-kontra-kenaikan-gaji-hakim-solusi-berantas-korupsi>. Diakses 10 Februari 2026.
- Nanda Aria, “*KPK Akui Gaji Hakim Naik Bisa Tekan Korupsi: Tergantung Orangnya*”, Tirto.id. 9 Februari 2026, [KPK Akui Gaji Hakim Naik Bisa Tekan Korupsi: Tergantung Orangnya](https://tirto.id/kpk-akui-gaji-hakim-naik-bisa-tekan-korupsi-tergantung-orangnya). Diakses 20 Februari 2026.
- Siaran Pers Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 20/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2023. <https://share.google/iubjcEcsn4gfcTsZK>. Diakses pada 10 Februari 2026.
- Tempo, “*ICW Catat 29 Hakim Jadi Tersangka Korupsi, Nilai Suap Capai Rp 107,9 M,*” Tempo.co, 17 April 2025, <https://share.google/tuyKl0blNfxmCviNq>. Diakses pada 9 Februari 2026.
- Tim detikcom, “*OTT KPK Jerat Hakim di Depok Bikin Kecewa Ketua MA*”, News.detik.com. 10 Februari 2026, [OTT KPK Jerat Hakim di Depok Bikin Kecewa Ketua MA](https://news.detik.com/ott-kpk-jerat-hakim-di-depok-bikin-kecewa-ketua-ma). Diakses 20 Februari 2026.